

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Kota Ambon

Sherly Ferdinandus
Ventje J. Kuhuparuw

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kimia Farma *Trading* dan *Distribution* Cabang Ambon

Imelda Talahatu

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ramla D. Saleh

Analisis Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Dana Perimbangan di Provinsi Maluku

Hermin Oppier

Permasalahan Agency Theory Pada Perbankan Syari'ah

Trisna Sary Lewaru

Analisis Pengaruh Citra Merek Terhadap Kempuasan Merek (Studi pada Pengguna *Handphone* Blackberry di Kota Ambon)

Erlinda Tehuayo

Sistem Informasi Akuntansi Permintaan Barang Dari Gudang pada PT. Mauwasa Sejahtera Ambon

Samuel Ratumurun

Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Ambon

Andre Sapthu

Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Equity*) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon

Senda Yunita Leatemia

Keunggulan Layanan Strategik dan Agenda Riset Mendatang

Nur Muhamad & Rainier Hendrik Sitaniapessy

Analisis Komoditi Tanaman Pangan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Maryam Sangadji

Tabungan dan Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya di Kota Ambon

Vera Paulin Kay

Kajian Tentang Pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Ambon

Sherly Rutumalessy

CE	Vol. IX	No. 1	Halaman 1 - 105	Ambon Mei 2015	ISSN 1978-3612
----	---------	-------	--------------------	-------------------	-------------------

ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DANA PERIMBANGAN DI PROVINSI MALUKU

Hermin Oppier

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah dana perimbangan yang diterima oleh Provinsi Maluku dari tahun 2004 – 2013. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier berganda dengan menggunakan asumsi klasik.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah investasi memberikan kontribusi yang baik/positif terhadap besarnya dana perimbangan yang diterima provinsi maluku sedangkan variable pertumbuhan ekonomi tidak signifikan.

Kata Kunci: investasi, pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, OLS

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terlihat bahwa tujuan dari Perimbangan Keuangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dalam masa pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik, pemerintah pusat masih tetap memegang sebagian besar urusan pemerintahan berikut juga menguasai sumber-sumber dananya. Sebenarnya pada masa Orde Baru tersebut telah banyak diterbitkan peraturan ataupun UU

tentang pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) tapi dalam pelaksanaannya pemerintah pusat kurang serius dalam proses desentralisasi.

Pemerintah Pusat masih mendukung sentralisasi, mungkin dengan argumen bahwa kebijakan desentralisasi ini memiliki potensi konflik dengan masalah distribusi dan manajemen makro ekonomi. Dalam suatu negara yang besar dengan berbagai disparitas sumber daya yang mencolok, kemampuan setiap daerah akan berbeda dalam memberikan pelayanan publik kepada penduduknya. Kemampuan daerah dalam memfasilitasi seluruh kegiatan perekonomian dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat erat kaitannya dengan sumber dana yang dimiliki Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber dari pusat kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan antar daerah yang terjadi karena kemampuan daerah yang berbeda-beda dalam menghimpun dana. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan dana dilakukan dengan berbagai cara. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- c) Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan Pembiayaan bersumber dari:

- a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b) penerimaan pinjaman daerah

c) dana cadangan daerah; dan

d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dana Perimbangan yang bersumber dari Bantuan pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan antar daerah yang terjadi karena kemampuan daerah yang berbeda-beda dalam menghimpun dana.

Salah satu instrumen fiskal dari Dana Perimbangan adalah berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan dan Investasi. Kontribusi belanja pembangunan akan menarik investor untuk dapat berinvestasi di daerah sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi di berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran.

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen sebagaimana yang terjadi di Propinsi Maluku seperti terlihat pada tabel 1.1 (lampiran)

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi, investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994: 107). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Pada lampiran 1.2 disajikan data investasi di provinsi Maluku dari tahun 2004 – 2013

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Dalam hal ini perekonomian dikatakan tumbuh dan berkembang bila mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat

kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya atau perkembangan yang baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun – tahun berikutnya (adanya pertumbuhan *output*).

Perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun bukan saja disebabkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi tetapi juga oleh kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai PDRB selama tahun penelitian (seperti terlampir pada lampiran tabel 1.3) harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung PDRB menurut harga konstan (PDRB riil). Di mana, PDRB riil berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2000 dihitung dengan rumus :

$$PDRB \text{ riil} = \frac{PDRB \text{ atas dasar harga berlaku}}{\text{Indeks Harga Konsumen}} \times 100$$

Dari apa yang digambarkan diatas dan berdasarkan data pada periode penelitian terlihat terjadi peningkatan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi tetapi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih besar sehingga penelitian ini akan menelaah seberapa besar pengaruh dari variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap dana perimbangan di provinsi Maluku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut Ketentuan Umum UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 169).

Desentralisasi

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8,

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: 4 dan 220).

Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibedakan atas penerimaan dari daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dari sumbangan dan bantuan. (Suparmoko, 2002: 29).

Pengeluaran Daerah

Proses dan pengalokasian anggaran haruslah berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti bahwa proses penyusunan anggaran hendaknya melibatkan banyak pihak dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya.

Pengeluaran anggaran (*budget expenditure*) dibedakan atas belanja rutin (*recurrent expenditure*) dan belanja modal (*capital expenditure*). Belanja rutin dapat diartikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya terus menerus, sedangkan belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang sifatnya tidak terus menerus dan ada batasnya.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak semakin baik pula implementasinya di lapangan. Keterlibatan berbagai lembaga/instansi di dalam proses perencanaan memerlukan kesatuan visi, misi dan tujuan dari setiap lembaga tersebut. Dalam menentukan alokasi dana anggaran untuk setiap kegiatan biasanya digunakan metode *incrementalism* yang didasarkan atas perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Pendekatan lain yang umumnya dipergunakan adalah *line-item budget* yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas item-item yang ada di masa lalu misalnya penetapan mata anggaran yang harus didasarkan pada Kepmendagri tentang penggunaan sistem digit dalam pelaksanaan APBD serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan

ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan.

Salah satu teori perubahan struktural yang paling terkenal adalah Model-Dua-Sektor Lewis yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis. Ia membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu : (1) Sektor Tradisional, yang menitik beratkan pada sektor pertanian yang subsisten di pedesaan yang ditandai dengan produktivitas marginal sama dengan nol sehingga menjadikan suatu kondisi yang surplus tenaga kerja (*surplus labor*). (2) Sektor Industri perkotaan Modern, yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari sektor tradisional.

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Secara umum Teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi , Teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik.

Teori Investasi

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan

investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Musgrave dalam Mangkoesobroto (1998) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Untuk dapat memulai pembangunan ekonomi dibutuhkan perencanaan ekonomi. Melalui perencanaan pembangunan berbagai kegiatan dapat diselenggarakan dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan. Melalui perencanaan dapat juga ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan pembangunan perlu ditetapkan beberapa hal berikut (1) tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, (2) tingkat tabungan dan investasi yang perlu diwujudkan, (3) peranan sektor swasta dan pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut, (4) perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan wilayah yang perlu dilakukan, dan (5) jumlah pembelanjaan dan sumber keuangan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang diterapkan (Sukirno, 1994).

Penelitian Terdahulu

Widyoworo (2002) mengatakan, berdasarkan rumus alokasi dana bantuan pusat diketahui bahwa penetapan alokasi dana pemerintah pusat antara lain didasarkan atas besarnya investasi, prasarana jalan, jumlah wisatawan dan PDRB Perkapita, dengan alat analisis Regresi Linier Berganda/Ordinary Least Square (OLS). Hasilnya diketahui bahwa investasi berpengaruh positif terhadap Bantuan Pusat. Menurutnya, hal ini dikarenakan Dana Bantuan Pusat antara lain berfungsi sebagai insentif bagi daerah untuk memacu investasi. Jadi semakin tinggi nilai investasi swasta yang ditanamkan di suatu daerah, semakin tinggi pula daerah yang bersangkutan menerima dana bantuan pemerintah pusat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hidayatno (2000) menunjukkan bahwa penentuan alokasi Dana Bantuan Pusat ditentukan oleh faktor-faktor luas, potensi daerah, populasi, potensi pertanian, sarana pertanian, sarana transportasi, sumber daya alam. Faktor-faktor tersebut terbentuk dari 21 variabel yang dianalisis dengan menggunakan AKU (Analisis Komponen Utama). Kemudian faktor-faktor yang terbentuk tersebut dianalisis dengan menggunakan

Regresi Linier Berganda, didapat bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi alokasi dana bantuan pusat secara nyata yaitu faktor luas, potensi daerah, dan sumber daya alam. Sedangkan faktor yang lainnya tidak mempengaruhi secara nyata.

Menurut Sidik (2002), DAU dibagikan untuk menutup fiscal gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang ada. Variabel-variabel yang mencerminkan kebutuhan daerah diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi Sumber Daya Alam, potensi Sumber Daya Manusia, dan PDRB.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan model persamaannya sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

$$X_1 = \text{Investasi}$$

$$X_2 = \text{PDRB}$$

Agar model yang diestimasi dapat menghasilkan estimator yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan bersifat *robust*, serta untuk melihat signifikansi dari model penelitian digunakan pengujian statistik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Hasil estimasi persamaan regresi berganda dengan menggunakan *software* EViews 6.0 adalah sebagai berikut:

$$Y = 27.71352 + 7.284773X_1 + 0.41582X_2$$

$$(1.146211) \quad (2.582507) \quad (1.793472)$$

$$R^2 = 0.781361$$

$$\text{Adj } R^2 = 0.768635$$

$$F\text{-hit} = 32.57208$$

$$DW = 3.627372$$

Uji Asumsi Klasik

Uji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan metode *White heteroskedasticity* dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Heteroskedasticity (White)

F-statistic	4.863565	Prob. F	0.0134
Obs*R-squared	4.140547	Prob. Chi-Square	0.0962
Scaled explained SS	3.017853	Prob. Chi-Square	0.5984

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5 maka dapat diperoleh informasi bahwa data yang digunakan/model yang dibangun tidak menghadapi masalah heteroskedastisitas, dengan indikator *Obs*R-squared* yang tidak signifikan secara statistik atau nilai probabilitas *chi-square* untuk *Obs*R-squared* adalah sebesar $0.0962 > 0,05$ ($\alpha=5\%$).

Hasil Uji Otokorelasi

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi masalah autokorelasi metode yang digunakan yaitu metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Apabila nilai probabilitas **Obs*R-squared** dari metode tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi mengandung masalah autokorelasi, sebaliknya apabila tidak signifikan secara statistik maka disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 2. Uji Autokorelasi Metode LM test

F-statistic	0.365118	Prob. F	0.8465
Obs*R-squared	0.816539	Prob. Chi-Square	0.7481

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa indikator *Obs*R-squared* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,7481 > 0,05$ ($\alpha=5\%$), yang berarti menolak H_a atau menyatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi. Hasil ini mengisyaratkan bahwa model regresi yang digunakan lolos dalam pengujian salah satu asumsi klasik yaitu tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model (Gujarati, 2003).

Hasil Uji Multikolinieritas

Masalah multikolinieritas adalah situasi dimana adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Menurut Gujarati (2003) yang mengatakan bahwa bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinieritas menjadi masalah yang serius. Gujarati juga menambahkan bahwa, apabila korelasi antara variabel penjelas tidak lebih besar dibanding korelasi variabel terikat dengan masing-masing variabel penjelas, maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah yang serius/terbebas dari multikolinieritas.

Dalam penelitian ini akan digunakan cara yang digunakan oleh Gujarati (2003) untuk mendeteksi masalah multikolinieritas yaitu dengan melihat

matriks korelasi (korelasi antar variabel bebas), yaitu jika korelasi antar variabel melebihi 0,80 diduga terdapat gejala multikolinieritas.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa hubungan (korelasi) antara variabel Investasi (X_1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X_2) adalah sebesar 0.567016. Nilai korelasi sebesar $0,567016 < 0,80$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

Uji t

Tingkat signifikansi yang digunakan untuk uji ini adalah 5%. Nilai kritis pada tabel yang diperoleh adalah 1.894579. Sementara nilai t-hitung variabel investasi adalah 2.582507 lebih besar dari nilai kritisnya, sehingga hipotesis nol ditolak pada derajat signifikansi 5%. Artinya, secara terpisah variabel investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan nilai t-hitung variabel pertumbuhan ekonomi adalah 1.793472 lebih kecil dari nilai kritisnya, sehingga hipotesis nol diterima pada derajat signifikansi 5%. Artinya, secara terpisah variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap dana bantuan pusat.

Tabel 3. Hasil Uji-t

Variabel	t hitung	Propabilitas	t tabel $\alpha=5\%$
X_1	2.582507	0.0006	1.894579
X_2	1.793472	0.6372	1.894579
C	1.361768	0.0009	1.894579

Sumber: data diolah

Uji F. Berdasarkan hasil output regresi diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 32.57208 dengan probabilitas 0,014736. Nilai F tabel pada derajat kebebasan *df denominator* 8 dan *df numerator* 2, adalah 3.113118. Karena nilai F hitung > F tabel maka semua variabel bebas secara simultan signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Uji Goodness of Fit, Nilai koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat serta pengaruhnya secara *general*. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1) berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Dari hasil estimasi regresi diatas, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.781361 dan nilai *Adjusted R²* sebesar 0.768635. Artinya, model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 76,86% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

V. PENUTUP

a.) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap dana perimbangan di provinsi maluku, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dana bagi hasil di provinsi Maluku dipengaruhi oleh besar kecilnya investasi, apabila investasi naik sebesar satu satuan maka dana bagi hasil akan meningkat sebesar 7.284773.
- 2) Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil yang artinya bahwa suatu daerah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonominya

b.) Saran

Pemerintah provinsi Maluku harus mengoptimalkan aliran modal masuk ke daerah melalui investasi dengan mempermudah atau mempermudah proses perijinan bagi investor untuk berinvestasi, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi.

REFERENSI

BPS Jakarta - Indonesia, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbagai edisi

BPS - Maluku dalam angka berbagai edisi

Gujarati. (2003). *Basic Econometrics*. Singapore : McGraw Hill.

Mudrajad Kuncoro. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta

Sarwedi. (2002). *Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4 No. 1: 17-35.

Sukirno, Sadono., (1985), *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana..